



**MUKTAMAR
PKB
2024**

**PROGRAM
PERJUANGAN DAN
AGENDA KERJA PKB
(PPAK-PKB)
PERIODE 2024-2029**

**"Politik Rahmatan Lil 'Alamin -
PKB Peduli Melayani untuk Solusi Bangsa"**

**MUKTAMAR PKB 2024
"PKB SOLUSI BANGSA"**

Bali, 24-25 Agustus 2024

PROGRAM PERJUANGAN DAN AGENDA KERJA PKB (PPAK-PKB) PERIODE 2024-2029

“Politik Rahmatan Lil ‘Alamin - PKB Peduli Melayani untuk Solusi Bangsa”

Pendahuluan

Partai politik menjadi entitas yang secara konsisten mendapatkan kepercayaan rendah dari publik. Berbagai jajak pendapat dari lembaga survei menunjukkan partai politik secara konsisten selalu menempati posisi paling bawah di bawah entitas publik lain seperti institusi TNI, Polri, Presiden, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi dan DPR. Dalam survei Indikator Politik yang dirilis pada Juli 2023 misalnya, tingkat kepercayaan publik kepada partai politik sebesar 65%. Angka ini terendah dibandingkan dengan kepercayaan terhadap lembaga lain seperti TNI dengan presentase 95,8%, Presiden 92,8%, Kejaksaan Agung 81,2%, Polri 76,4%. DPD 73%, DPR 68,5, serta Parpol 65,2%. Mayoritas publik memandang partai politik selalu berjarak dengan kepentingan mereka. Partai politik dipandang hanya hadir di saat menjelang kontestasi politik. Situasi inilah yang hendak diubah oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Program Perjuangan dan Agenda Kerja bertajuk “Politik Rahmatan Lil Alamin-PKB Peduli Melayani untuk Solusi Bangsa” selama lima tahun kedepan (2024-2029).

Selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya pada tahun-tahun terakhir (2023-2024), daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini termasuk kebijakan moneter global yang ketat, seperti kenaikan suku bunga di negara-negara besar, yang mengakibatkan melemahnya ekspor Indonesia dan turunnya harga komoditas. Kondisi ini berdampak pada sektor riil dan secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat di dalam negeri.

Selain itu, ada juga peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencerminkan kondisi ekonomi yang semakin sulit. Sepanjang paruh pertama tahun 2024 saja, terjadi peningkatan jumlah PHK sebesar 21,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa penurunan daya beli akan terus berlanjut jika tidak ada intervensi kebijakan yang efektif.

Pengusaha juga mengkhawatirkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direncanakan dapat semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, ada risiko bahwa ekonomi nasional akan melambat, yang pada akhirnya bisa meningkatkan angka kemiskinan dan menambah beban bagi pemerintahan selanjutnya.

Fenomena kesenjangan kekayaan atau tingkat konsentrasi kekayaan yang tinggi di Indonesia menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dan stabilitas sosial di Indonesia. Tingkat konsentrasi kekayaan di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan nasional dikuasai oleh sekelompok kecil orang kaya. (i) Menurut laporan dari Oxfam dan Credit Suisse, sekitar 1% dari populasi terkaya di Indonesia menguasai hampir setengah dari total kekayaan negara. Pada tahun 2022, diperkirakan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang setara dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin di negara ini.

Data menunjukkan bahwa di Indonesia, 10% orang terkaya menguasai lebih dari 70% dari total kekayaan nasional. Ini mencerminkan kesenjangan kekayaan yang sangat besar, di mana sebagian besar kekayaan negara terkonsentrasi di tangan segelintir elit ekonomi. **Indeks Gini kekayaan**, yang mengukur ketidakmerataan distribusi kekayaan, juga menunjukkan angka yang tinggi di Indonesia. Indeks ini berkisar antara 0,5 hingga 0,6, di mana 0 menunjukkan distribusi yang sempurna dan 1 menunjukkan ketidakmerataan total. Ketimpangan kekayaan di Indonesia relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Ketimpangan kekayaan di Indonesia diperparah dengan tingginya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pada tahun 2023, Indeks Gini di Indonesia tercatat sekitar **0,38**. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan cukup tinggi, meskipun ada sedikit perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana Indeks Gini pernah mencapai sekitar **0,41** pada tahun 2015. Indeks Gini memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan yang ekstrem (satu orang menguasai semua pendapatan).

Ketimpangan pendapatan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, ketimpangan wilayah (antara perkotaan dan pedesaan), dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan yang berkualitas. Selain itu, struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor informal juga berkontribusi pada ketimpangan ini.

Jumlah pengusaha di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi terciptanya distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih merata di tanah air. Data terbaru menunjukkan sekitar 3,47% dari total penduduk Indonesia adalah pengusaha. Angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara maju, di mana persentase pengusaha bisa mencapai 10-12%. Dengan populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, jumlah pengusaha diperkirakan sekitar 9,3 juta orang. Ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar. Pemerintah Indonesia memiliki target untuk meningkatkan jumlah pengusaha hingga mencapai 4% dari total populasi.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan dukungan yang lebih besar dalam bentuk regulasi, akses keuangan, dan pendidikan kewirausahaan.

Harus diakui kualitas sumber daya manusia (SDM) masih mempunyai banyak kelemahan. Banyak tenaga kerja kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri modern. Ini termasuk keterampilan teknis, digital, dan soft skills seperti komunikasi, manajemen waktu, dan pemecahan masalah. Rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional sering disebut sebagai penyebab utama keterampilan yang tidak memadai ini. Meskipun akses ke pendidikan dasar telah meningkat, kualitas pendidikan di banyak daerah masih tertinggal. Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja, rendahnya kualitas guru, dan fasilitas yang tidak memadai berkontribusi pada rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini mengakibatkan banyak lulusan yang tidak siap kerja dan tidak kompetitif di pasar kerja global.

Produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Faktor-faktor seperti budaya kerja yang kurang efisien, penggunaan teknologi yang terbatas, dan kurangnya inovasi turut berkontribusi pada rendahnya produktivitas. Investasi dalam pengembangan SDM, seperti pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan, dan pendidikan berkelanjutan, masih kurang. Banyak perusahaan yang tidak memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan mereka, dan program pemerintah seringkali tidak mencakup semua kebutuhan pasar kerja.

Rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi juga menjadi salah satu indikator kualitas SDM Indonesia. Data menunjukkan Angka Partisipasi Murni atau APM mencerminkan persentase dari populasi usia 19-23 tahun yang terdaftar di lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun-tahun terakhir, APM pendidikan tinggi di Indonesia berkisar sekitar **18-20%**. Ini berarti bahwa hanya sekitar 18-20% dari populasi usia 19-23 tahun yang benar-benar melanjutkan ke pendidikan tinggi di usia yang tepat. Angka ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara yang memiliki sistem pendidikan lebih maju, dan ini mencerminkan tantangan dalam akses dan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Faktor-faktor seperti ekonomi, geografis, dan kualitas pendidikan di tingkat menengah menjadi kendala utama yang mempengaruhi APM.

Indonesia saat ini sedang menghadapi kekurangan dokter dan dokter spesialis, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Hingga tahun 2023, Indonesia masih kekurangan dokter umum, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan pedesaan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, rasio dokter terhadap jumlah penduduk di Indonesia adalah sekitar 1:2.500-3.000, yang masih jauh dari standar ideal WHO yaitu 1:1.000. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan lebih banyak dokter untuk mencapai rasio ideal tersebut. Diperkirakan bahwa Indonesia kekurangan sekitar 20.000-30.000 dokter umum untuk mencapai distribusi yang lebih merata.

Masalah utama dalam ketersediaan dokter dan dokter spesialis di Indonesia adalah distribusi yang tidak merata. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung memiliki konsentrasi dokter dan spesialis yang tinggi, sementara daerah-daerah terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa bagian Kalimantan dan Sumatera menghadapi kekurangan

yang serius. Kekurangan tenaga medis ini menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, dan membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta.

Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia menjadi masalah tersendiri. Salah satu indikatornya adalah rendahnya cakupan peserta atau penerima manfaat Jamsos Ketenagakerjaan. Pada tahun 2023, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai lebih dari 60 juta orang. Ini terdiri dari pekerja di sektor formal, informal, dan termasuk pekerja migran Indonesia. Berdasarkan estimasi, jumlah tenaga kerja di Indonesia termasuk pekerja migran sekitar 140-150 juta orang. Jika jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah 60 juta, maka ini mencakup sekitar **40-43%** dari total tenaga kerja di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dalam cakupan jaminan ketenagakerjaan, masih ada lebih dari separuh **tenaga kerja yang belum terdaftar atau tidak memiliki perlindungan jaminan** ketenagakerjaan. Salah satu segmen pekerja yang belum dilayani dengan baik oleh BPJamsostek adalah Pekerja Migran Indonesia, termasuk di Malaysia, Hongkong, Korea Selatan, Arab Saudi dan sebagainya. Artinya pemerintah belum mampu mewujudkan portabilitas layanan Jamsos bagi semua pekerja. Meski mereka sudah membayar iuran dan menjadi anggota.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal ketersediaan dan kekurangan fasilitas cold storage, terutama terkait dengan pengelolaan produk pertanian, perikanan, dan pangan lainnya yang membutuhkan penyimpanan suhu rendah untuk menjaga kualitas dan keamanannya. Kekurangan cold storage menyebabkan **kerugian ekonomi yang signifikan**, terutama dalam industri perikanan dan pertanian, di mana produk-produk yang mudah rusak sering kali tidak dapat dijual dengan harga yang optimal atau bahkan terbuang karena rusak. Ini juga berdampak pada harga konsumen, terutama di luar musim produksi.

Hingga 2023, Indonesia memiliki sekitar **1.000 hingga 1.200 unit cold storage** yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagian besar fasilitas ini terkonsentrasi di daerah perkotaan atau pusat produksi besar, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Namun, distribusi fasilitas ini tidak merata, dengan banyak daerah terpencil atau kepulauan yang masih kekurangan fasilitas cold storage yang memadai.

Diperkirakan bahwa Indonesia masih kekurangan **sekitar 30-40%** dari total kebutuhan cold storage yang ideal untuk mendukung seluruh sektor yang memerlukannya, terutama dalam industri perikanan dan pertanian. Kekurangan ini paling terasa di daerah-daerah seperti Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa bagian Kalimantan dan Sulawesi, di mana produksi hasil tangkapan ikan atau produk pertanian sering kali tidak dapat disimpan dengan baik karena terbatasnya fasilitas penyimpanan dingin.

Indonesia juga mengalami Deindustrialisasi dini. Tanda-tanda dan indikator deindustrialisasi di Indonesia nyata dalam berbagai indikator kunci. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan sektor industri manufaktur yang melambat atau bahkan mengalami kontraksi. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur relatif stagnasi atau menurun. Rasio pekerja di sektor industri manufaktur terhadap total angkatan kerja terus berkurang. Migrasi Tenaga Kerja dari Sektor Industri ke Sektor Lain. Banyak pekerja terampil beralih ke sektor

jasa atau informal akibat berkurangnya kesempatan kerja di industri. Terjadi perpindahan tenaga kerja dari pusat-pusat industri ke sektor pertanian atau sektor informal perkotaan.

Realisasi investasi asing maupun domestik di sektor industri manufaktur cenderung menurun. Banyak perusahaan industri yang menutup atau memindahkan pabriknya ke luar negeri. Pangsa pasar produk industri manufaktur Indonesia di pasar domestik maupun global semakin tergantikan oleh produk impor. Kemampuan ekspor produk industri manufaktur Indonesia yang terbatas.

Akhirnya, berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia membutuhkan jawaban kongkret dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai politik di tanah air. Berbagai tantangan menjadi bagian dari rumusan Program Perjuangan dan Agenda Kerja (PPAK) **“Politik Rahmatan Lil Alamin-PKB Peduli Melayani untuk Solusi Bangsa” 2024-2029.**

Landasan Gerak

Peradaban umat manusia seharusnya berpijak pada realitas dan sejarah kemanusiaan. Tugas suci yang harus diemban manusia adalah memberi jalan terang bagi kemaslahatan seluruh insan, tanpa memandang latar agama, suku, ras dan golongan. Itulah inti dan ruh politik *rahmatan lil 'alamin* yang akan dibumikan Partai Kebangkitan Bangsa dalam gerak dan perjuangannya di masa mendatang.

Keberadaan partai politik adalah sebuah keniscayaan dalam praktik negara demokrasi modern. Partai hadir, seperti kata Plato, sebagai sesuatu yang agung dan suci, atau seperti kata Al-Ghozali dalam *Al-Tibr Al-Masbuk Fii Nasihat-al Mulk* sebagai profesi yang mulia. Konsekuensinya, partai politik harus mampu mengambil peran-peran strategis dalam kemajuan bangsa. Partai politik harus mampu menangkap peluang dan tantangan, menggerakkan pikiran dan tindakan yang nyata bagi transformasi kehidupan berbangsa. Transformasi harus dilakukan partai untuk menciptakan terobosan yang lebih inovatif. Karena berbagai sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya bangsa saat ini tampak begitu kedodoran.

Dalam perubahan global yang tak terhindarkan, PKB harus mampu memosisikan diri, menjadi bagian, dan mengambil peran penting untuk turut mewarnai perubahan di masa depan. Setidaknya ada enam penggerak perubahan global paling penting yang harus diantisipasi setiap bangsa (*The Future*, Al Gore, 2013). Perubahan itu harus kita antisipasi serta kita rebut untuk membentuk masa depan kita.

Pertama, ekosistem ekonomi global yang semakin saling terhubung. *Kedua*, hadirnya jejaring komunikasi elektronik berlingkup global yang menghubungkan pemikiran dan perasaan miliaran orang dan menarik mereka ke dalam suatu 'big data' yang tumbuh semakin cepat. *Ketiga*, perubahan keseimbangan politik, ekonomi, serta militer yang sama sekali baru dan secara radikal berlainan dengan tatanan abad ke-20. *Keempat*, munculnya pertumbuhan cepat, tetapi tak berkelanjutan; kependudukan, kota, konsumsi, sumber daya dan habisnya lapisan subur tanah. *Kelima*, penemuan teknologi sains material, genetika, biokimia, serta biologi revolusioner. *Keenam*, perubahan hubungan yang sama sekali baru antara peradaban manusia dengan sistem ekologi bumi.

Dalam 5 tahun ke depan, Megatrend dunia harus menjadi pertimbangan karena bersifat disruptif dan berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita menyaksikan berbagi disrupsi telah terjadi dalam 5 tahun terakhir. Virus Covid-19 yang dimulai dari satu negara begitu cepat menjalar ke belahan dunia lain, tak terkecuali Indonesia, dengan membawa serta krisis ekonomi global. Kita juga sudah menyaksikan konflik geopolitik di Rusia-Ukraina yang memberi pengaruh kepada ketersediaan pangan dan rantai pasok industri. Alhasil, semua negara kini bergerak cepat untuk memperkuat ekonomi dalam negeri dan lebih proteksionis.

Kita juga telah menyimak tren dan perkembangan politik 10 tahun terakhir di mana demokrasi Indonesia telah bergeser ke arah oligarki. Indikator utama tren ini meliputi konsentrasi kekuasaan hanya di tangan sekelompok kecil elite yang mendominasi kekuatan politik dan ekonomi; ketimpangan ekonomi yang semakin lebar karena sekelompok kecil elite mengendalikan sebagian besar sumber daya; kontrol ketat yang membatasi dan menyensor media massa yang kritis terhadap rezim; dan penggunaan aparat militer dan polisi untuk menekan kubu oposisi. Semua kondisi ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang tak terhitung jumlahnya.

Berbagai dinamika dan tantangan itu jelas menuntut respons cepat dan tepat dari setiap elemen bangsa, termasuk partai politik sebagai salah satu pilarnya. Di sisi lain, semua partai politik termasuk PKB dituntut untuk senantiasa beradaptasi agar tetap relevan dan dipercaya rakyat. Tugas berat itu mesti dilakukan berbarengan dengan usaha mewujudkan visi besar partai untuk pemerataan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan pembangunan.

PKB sebagai bagian dari bangsa ini punya kewajiban untuk turut menuntaskan pekerja besar tersebut. Ini adalah komitmen PKB yang hendak mewujudkan politik *rahmatan lil 'alamin, Peduli-Melayani untuk Solusi Bangsa*. Berlandaskan *Mabda' Siyasiy*, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga serta *platform* politik *Rahmatan Lil Alamin*, PKB menerjemahkan langkah-langkah politik partai dalam "**Program Perjuangan dan Agenda Kerja PKB (PPAK-PKB)**" 2024-2029 yang dibagi dalam dua kategori, yaitu:

A. SOLUSI BANGSA- Program Kerja Eksternal

1. Pemerataan dan Pertumbuhan;
2. Infrastruktur, Konektivitas, dan Desa;
3. Keadilan Ekologis;
4. Ibu, Perempuan, dan Keluarga;
5. Pangan dan Kebutuhan Pokok;
6. Pemberantasan Kemiskinan;
7. Pendidikan Kesehatan;
8. Rumah Kerja Indonesia;
9. Generasi Muda dan Santri;
10. Toleransi Minoritas dan Difabel; dan
11. Keadilan dan Antikorupsi.

B. 7 SUKSES LEMBAGA - Program Kerja Internal

1. Ideologisasi dan Kaderisasi;
2. Dana Abadi Partai;
3. Gerakan Layanan Sosial;
4. Membangun Basis Ekonomi;
5. Peningkatan Manajemen Kinerja Fraksi;
6. Pengembangan Litbang; dan
7. Manajemen Media.

Program Kerja Eksternal

I. Pemerataan dan Pertumbuhan

1. Melakukan pendampingan usaha untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu bagian dari program Bantuan Hukum dan Usaha (BAHU) DESA. BUMDes diarahkan untuk menggarap berbagai bidang usaha seperti sentra produksi pupuk organik, lembaga keuangan mikro yang kredibel, pengelola Program Satu Desa Satu Produk Unggulan.
2. Mendorong pengembangan kawasan ekonomi maritim khusus dengan fokus mewujudkan Lumbung Ikan Nasional dan Pasar Ikan Rakyat (LIN-PIR) di wilayah-wilayah pemukiman nelayan.
3. Mendorong percepatan pembangunan provinsi-provinsi kepulauan yang terdiri dari Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, serta provinsi-provinsi lain yang memiliki banyak gugus kepulauan.
4. Mendorong pembangunan desa-desa industri di antaranya melalui hilirisasi industri, pembangunan industri berorientasi ekspor dan digitalisasi ekonomi desa.
5. Mendorong revitalisasi Unit-Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan-Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT) dan menjadikannya sebagai Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru, salah satunya dengan membangun Desa Peternakan Terpadu dan Desa Pertanian Terpadu.
6. Mendorong realisasi swasembada pangan untuk menegakkan kedaulatan pangan berbasis desa.
7. Mewujudkan Reforma Agraria, melakukan redistribusi tanah seluas 12 juta hektar kepada petani tak bertanah dan petani gurem dalam skema rumah tangga petani dan koperasi produksi pertanian. Salah satunya dengan mendorong pembentukan Badan Penyelesaian Konflik Agraria Nasional untuk menuntaskan seluruh konflik agraria struktural yang terjadi.
8. Terlibat aktif dalam penyelesaian sengketa tanah di kawasan kehutanan pada 25.863 desa dengan pendekatan pemulihan dan penguatan hak atas tanah kepada

masyarakat. Selain itu, ikut memperkuat akses pembangunan pada kawasan reforma agraria melalui pembangunan kawasan desa mandiri dan kawasan perdesaan modern.

9. Mendorong pembangunan Desa-Desa Wisata dan Desa-Desa Wisata Internasional yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata dan menciptakan lapangan kerja baru.

II. Infrastruktur, Konektivitas, dan Desa

1. Mendorong peningkatan Dana Desa hingga mencapai Rp5 miliar per desa untuk mempercepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Meningkatkan elektrifikasi dan digitalisasi desa terluar, terdepan, tertinggal (3T) dan terisolasi yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Hal ini berarti memberikan akses listrik untuk menerangi rumah, meningkatkan kenyamanan dan keamanan hidup masyarakat.
3. Mendorong pembentukan Badan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi, demokratis, transparan, dan berkeadilan.
4. Memastikan optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan desa dan jalan-jalan penghubung antar desa (jalan kabupaten/kota).
5. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur desa dengan memanfaatkan potensi lokal, pelibatan swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat.
6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti aplikasi yang memungkinkan masyarakat dan pejabat desa memantau kemajuan proyek secara *real-time* dan memberikan laporan mengenai kondisi infrastruktur.

III. Keadilan Ekologis

1. Menggalang program “Indonesia Menuju Bio Energi” dengan menjadikan energi surya, panas bumi, air dan angin sebagai sumber energi utama.
2. Aktif mendorong reboisasi sepertiga dari seluruh area hutan Indonesia yang rusak. Antara lain memberi insentif untuk daerah-daerah yang sukses melakukan reboisasi, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang.
3. Merevisi hukum lingkungan dan mengoptimalkan penegakannya agar Indonesia dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan memenuhi komitmen keberlanjutan global.
4. Membentuk dan mengaktifasi Badan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (BPDPI) untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan memperkuat ketahanan masyarakat serta ekosistem.
5. Melakukan modernisasi, digitalisasi mitigasi bencana, dan pemantauan lingkungan hidup.

6. Memperluas taman-taman hutan lindung yang diorientasikan pada konservasi lingkungan hidup dan pemberantasan kemiskinan.
7. Meningkatkan penggunaan biodiesel, antara lain dengan berinovasi memanfaatkan sampah perkebunan kelapa sawit.
8. Mendorong hilirisasi industri mineral dan batubara dengan berorientasi pada kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja, dan keberlanjutan lingkungan hidup.
9. Mengembangkan transportasi publik masa depan yang ramah lingkungan melalui elektrifikasi dan gasifikasi moda-moda transportasi publik.
10. Menetapkan Kawasan Larangan Impor Limbah B3 dan menjadikan Indonesia sebagai pusat daur ulang dunia, mendorong ekonomi sirkular, serta meningkatkan kepedulian terhadap kantong non-plastik untuk mewujudkan Indonesia Bebas Kantong Plastik.
11. Membangun sikap proaktif dan mempelopori kerja sama internasional untuk penyelamatan lingkungan; menjadikan “Selamatkan Bumi, Selamatkan Masa Depan” sebagai pesan utama diplomasi Indonesia.

IV. Ibu, Perempuan dan Keluarga

1. Berkomitmen pada pengarusutamaan program untuk ibu, perempuan, dan keluarga seperti pembangunan rumah layak huni untuk lansia, memberikan bantuan sosial kepada perempuan kepala keluarga dan anak-anak yatim, serta mengaktivasi rumah kerja perempuan.
2. Mendorong penajaman alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) terutama untuk sepeda motor dan angkutan umum.
3. Mendorong upaya pemberian tunjangan untuk Purnawirawan TNI dan Polri (khususnya Bintara dan Tamtama), pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan I dan II.
4. Mengoptimalkan peran koperasi melalui: (a) transformasi BUMN-BUMN Layanan Publik sebagai Koperasi; (b) revitalisasi BUMDes dengan menjadikannya sebagai Koperasi; (c) revitalisasi Koperasi-koperasi Pondok Pesantren; dan (d) membentuk Badan-Badan Usaha Milik Rakyat (BUM-Petani, BUM-Nelayan, dll
5. Pengaktivasian Rumah Wirausaha sebagai bentuk penyejahteraan keluarga, memberikan bantuan tunai kepada pelaku seni/hiburan tradisional berskala kecil, serta meningkatkan tunjangan bidan desa.
6. Mewujudkan program Indonesia Ramah Ibu dan Anak, antara lain melalui: (a) menyediakan ruang khusus penitipan anak (di desa, di unit usaha dan unit kerja); (b) meningkatkan jumlah hari cuti bagi suami untuk pendampingan istri melahirkan; dan (c) memberikan tunjangan makanan tambahan untuk balita dan ibu menyusui.

V. Pangan dan Kebutuhan Pokok

1. Memastikan program restorasi lahan gambut untuk produksi pangan secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mencegah kerusakan lebih lanjut.
2. Mendorong pembangunan cadangan pangan strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dalam situasi krisis.

3. Melakukan pendampingan usaha kepada petani dan nelayan melalui BAHU DESA dan menyediakan akses pembiayaan yang mudah untuk petani dan pengusaha kecil agar dapat mengembangkan usaha pertanian dengan bantuan tunai, subsidi pupuk, dan subsidi solar untuk nelayan.
4. Pemberdayaan petani melalui pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan agrikultur dan teknologi pertanian modern serta menyediakan peralatan pertanian dan benih unggul untuk petani guna meningkatkan produktivitas.
5. Meningkatkan distribusi bantuan sosial pangan dan kebutuhan pokok di daerah terpencil melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi penerima bantuan dan mendukung distribusi.
6. Membangun rantai pasok pangan melalui kerja sama antara petani dan distributor untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi pangan dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi dan *platform online* untuk mempermudah akses informasi pasar dan cuaca bagi petani.
7. Pemetaan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat dengan teknologi digital seperti sistem informasi geografis, survei *online*, teknologi citra satelit agar menjadi lebih akurat dan responsif terhadap situasi di lapangan.
8. Mendorong pelibatan swasta dalam membangun cadangan pangan dan kebutuhan pokok strategis antara lain dengan kemitraan publik-swasta (KPBU) agar dapat dikelola lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika pasar serta kebutuhan masyarakat.

VI. Pemberantasan Kemiskinan

1. Mengoptimalkan *database* kemiskinan Indonesia serta digitalisasi sistem Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemberantasan Kemiskinan.
2. Memberikan perhatian besar pada upaya aktivasi Jaringan Pasar (JAS) MERAH PUTIH: Jaringan pasar penyedia kebutuhan pokok murah berbasis komunitas di desa-desa dan kantong-kantong kemiskinan kota.
3. Mendorong peningkatan jumlah rumah wirausaha sebanyak 12 juta per tahun.
4. Melakukan pendampingan Rumah Wirausaha melalui BAHU DESA.
5. Meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional melalui mengoptimalkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
6. Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia yang dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.
7. Mengakselerasi Industri Jasa Keuangan Syariah Indonesia menjadi industri yang kredibel, kompetitif, dan berkelanjutan.
8. Memberikan pendampingan usaha kepada Keluarga Harapan melalui BAHU DESA.
9. Membuat Peraturan Perlindungan Pekerja yaitu kebijakan yang memastikan pekerja di sektor informal mendapatkan perlindungan dan hak yang layak.

10. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pelatihan dan akses permodalan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.
11. Penyediaan kursus dan fasilitas inkubasi bisnis untuk mendorong individu memulai usaha baru.
12. Pengembangan pasar lokal dan koperasi yang memperkuat ekonomi masyarakat rural dan memperluas akses pasar.

VII. Pendidikan dan Kesehatan

1. Mendorong peningkatan beasiswa dan bea-latih sebanyak 150.000 kursi per tahun, untuk: (a) 50.000 bea-latih profesi per tahun (guru, pengajar, pengasuh pondok pesantren, instruktur), (b) 50.000 beasiswa profesi dalam negeri/luar negeri per tahun, dan (c) 50.000 beasiswa siap kerja.
2. Mendorong beasiswa pendidikan perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman.
3. Memastikan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai pusat layanan kesehatan komunitas, ibu dan anak.
4. Mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri dan memperbaiki regulasi pajak PPN/PPnBm untuk impor alat kesehatan.
5. Mendorong fasilitas kesehatan kelas satu di setiap provinsi selama lima tahun serta di setiap kabupaten/kota selama sepuluh tahun, antara lain dengan membangun Rumah Sakit Kelas A di 22 Provinsi.
6. Memastikan perhatian untuk pencegahan stunting, salah satunya dengan mendorong adanya tunjangan tunai untuk ibu hamil
7. Mendorong pemenuhan jumlah dokter di Indonesia dengan memperbesar skala beasiswa Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Kedokteran Spesialis.
8. Memastikan adanya Layanan Kesehatan Mental di desa melalui Posyandu, Puskesmas dan Puskesmas Bersama (Puskesmasma).
9. Mendorong modernisasi seluruh Puskesmas Pembantu.
10. Mendorong revitalisasi pelayanan penyediaan air bersih bagi seluruh masyarakat melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan menimbang kebutuhan konservasi lingkungan.

VIII. Rumah Kerja Indonesia

1. Meningkatkan peluang kerja dengan mendorong pembentukan rumah kerja Indonesia, meningkatkan akses kredit usaha bagi UMKM, hingga mendorong optimalisasi Balai Latihan Kerja di seluruh wilayah Indonesia.
2. Mendorong pembukaan lapangan kerja secara luas dengan mengoptimalkan kebijakan TKDN. Selain itu, memastikan adanya *skill development fund* untuk mempercepat pelatihan kerja dan pengembangan profesi serta bisnis.

3. Menggalang pembentukan dan aktivasi asosiasi buruh migran di seluruh dunia, dan membentuk serta mengaktifkan Lingkaran Persaudaraan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di seluruh Indonesia.
4. Mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia untuk membuka berbagai peluang lapangan kerja di berbagai sektor, antara lain digital melalui pengembangan aplikasi dan *platform* untuk memasarkan produk halal secara daring.
5. Menciptakan peluang kerja di sektor digital di pedesaan dan masyarakat pesisir pantai seperti toko daring yang menjual produk hasil pertanian, olahan ikan, dan kerajinan lokal melalui pelatihan dan akses terhadap teknologi.
6. Mendorong tumbuhnya perusahaan rintisan (*start-up*) teknologi pertanian oleh pemuda desa, misalnya mengembangkan aplikasi yang membantu petani dalam manajemen pertanian, pemantauan tanaman, dan pemasaran produk.

IX. Generasi Muda dan Santri

1. Mendorong program Kredit Milenial Mandiri dan Kredit Santri Milenial Mandiri, selain memastikan program memenuhi kebutuhan hunian layak milenial.
2. Mewujudkan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan teknologi untuk santri dan mengembangkan pendidikan kejuruan di pondok pesantren.
3. Mendorong pengarusutamaan Pendidikan Budi Pekerti untuk membantu menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat dan penting dalam membentuk karakter yang baik. Menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten dapat memberikan dampak jangka panjang dalam pembangunan karakter dan moral generasi selanjutnya.
4. Memastikan adanya Dana Abadi Pengembangan Olahraga (DAPOR) Indonesia.
5. Mengoptimalkan rencana pembangunan satu wahana/lapangan olahraga di setiap desa, dan satu kawasan khusus pengembangan olahraga di setiap kabupaten/kota.
6. Mendorong rerevitalisasi Balai Budaya dan membangun Kawasan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan di setiap kabupaten/kota.
7. Memastikan Jaminan Sosial dan Jaminan Sosial Hari Tua untuk seniman dan budayawan.
8. Mendorong santri untuk memanfaatkan teknologi dalam usaha mereka, seperti *e-commerce* dan aplikasi pertanian.
9. Pengembangan kegiatan kreatif dan seni santri dengan memfasilitasi santri untuk berkarya dalam seni dan budaya yang bisa dipasarkan, seperti musik, seni rupa, atau teater.

X. Toleransi Minoritas dan Difabel

1. Memberikan perhatian kepada para difabel dengan mendorong pembangunan Rumah Kerja Difabel dan membangun Sekolah Tinggi Difabilitas.
2. Melakukan revisi Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang Difabilitas.
3. Membuat dan menegakkan Undang-Undang Perlindungan Minoritas.

4. Memastikan pemerintah daerah mengimplementasikan peraturan yang menjamin aksesibilitas umum, seperti transportasi dan gedung publik, bagi kalangan difabel.
5. Mendorong kementerian meluncurkan program perlindungan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan difabel dalam bentuk pelatihan dan pengembangan keterampilan.
6. Meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak difabel dan pentingnya inklusi.
7. Mendorong perusahaan agar meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas dengan mengadakan pelatihan dan mempekerjakan individu dari kalangan difabel.
8. Memastikan pelaksanaan program sekolah inklusi dan pendidikan yang mengintegrasikan anak-anak difabel dengan anak-anak non-difabel dalam satu lingkungan belajar. Hal ini juga mencakup pelatihan untuk guru dalam menangani dan mengajar siswa difabel secara efektif.
9. Mengampanyekan peluncuran beasiswa yang ditujukan untuk pelajar difabel untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
10. Memastikan inisiasi program-program yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati, serta mengurangi diskriminasi terhadap kaum minoritas melalui upaya kolaboratif dari berbagai stakeholder.

XI. Keadilan dan Antikorupsi

1. Mengefektifkan Program Satu Data Indonesia yang memiliki peran penting dan signifikan bagi pemerintahan desa, seperti penyediaan data yang akurat dan konsisten yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Memberikan status Aparat Sipil Negara kepada perangkat desa yang diharapkan bisa memacu kapabilitas dan produktivitas perangkat desa dalam melayani warga.
3. Melakukan pendampingan hukum bagi kepala desa dan perangkatnya melalui BAHU DESA.
4. Mendorong pendirian sekolah Tinggi Perangkat Desa untuk pengembangan kompetensi dengan membekali perangkat desa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola pemerintahan desa secara efektif.
5. Mendorong penyediaan Dana Abadi Penyehatan Demokrasi Indonesia.
6. Membuat serta menegakkan Undang-Undang Pendanaan Politik (*Political Financing*) yang mengatur: (a) sistem penggalangan/pengumpulan dana dalam kegiatan partai politik dan pemilu, (b) sistem pengeluaran dana dalam kegiatan partai politik dan pemilu, dan (c) larangan dan sanksi terhadap berbagai bentuk praktik “balas budi pejabat publik hasil pemilu kepada kontributor dana pemenangan pemilu” (*repayment*).
7. Mengoptimalkan beasiswa untuk perangkat desa melalui RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau).
8. Menghapus pajak hiburan berskala kecil/tradisional untuk menumbuhkan pengembangan usaha.

9. Melakukan digitalisasi layanan-layanan publik di desa untuk mempermudah warga mendapatkan pelayanan dan mengakses secara *real-time* penanganan keluhan warga.
10. Mereformasi dan merevitalisasi kelembagaan pajak dan fiskal.
11. Melakukan revisi mendasar Undang-Undang HAM, antara lain untuk menjamin perlindungan pembela HAM, menguatkan institusi-institusi HAM nasional, dan membentuk lembaga pemulihan sosial-ekonomi korban pelanggaran HAM Berat.
12. Melakukan restrukturisasi birokrasi, menaikkan gaji/tunjangan ASN, dan digitalisasi berbagai aspek kerja birokrasi untuk mengoptimalkan efisiensi birokrasi serta mempercepat dan mempermudah layanan-layanan publik.
13. Menjadikan riset dan pengembangan (*research and development*) sebagai bagian pokok dalam ekosistem perancangan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik semua sektor.

Program Kerja Internal

XII. Ideologi dan Kaderisasi

- a. DAULAT PARTAI adalah prinsip untuk menegakkan otoritas partai secara bulat dalam proses pengambilan keputusan dan menjalankan kebijakan. Kedaulatan partai ini mencakup beberapa aspek yakni (a) kemandirian: di mana partai tidak terpengaruh dengan kekuatan eksternal yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan maupun saat menjalankan garis kebijakan; (b) kepatuhan terhadap ideologi: menegaskan kesetiaan terhadap ideologi partai sebagai rujukan setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan; (c) konsolidasi internal: penguatan struktur organisasi partai dari pusat hingga daerah untuk memastikan adanya kesatuan visi dan misi; dan (d) kepemimpinan yang kuat: memiliki pemimpin yang kuat dan visioner yang bisa memandu partai dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang dalam setiap dinamika kehidupan bangsa.
- b. DISIPLIN PARTAI adalah prinsip penting dalam menjaga efektivitas, koherensi, dan kesatuan dalam menjalankan setiap keputusan dan kebijakan partai dalam mewujudkan tujuan ideologis partai. Dengan menjaga disiplin partai yang kuat, maka partai secara institusi dapat lebih efektif memobilisasi dukungan politik, mengelola konflik internal dan mencapai tujuan strategis jangka panjang yang telah ditetapkan. Disiplin partai juga menjadi syarat utama membangun reputasi partai yang kuat dan dihormati di mata publik. Disiplin partai ini meliputi (a) Disiplin Ideologi: mewajibkan seluruh pengurus dan kader partai senantiasa berpegang teguh terhadap nilai dan ajaran ideologi, mabda siyasi partai; (b) Disiplin Organisasi: mewajibkan seluruh pengurus dan kader partai untuk tunduk dan patuh terhadap AD/ART, setiap norma peraturan, keputusan-keputusan, dan instruksi partai.
- c. KADERISASI menjadi langkah penting dalam memastikan proses regenerasi keanggotaan, transformasi ideologi partai, dan perluasan basis konstituen terus berlangsung. Kaderisasi juga sangat dibutuhkan dalam menyiapkan kader-kader mumpuni partai untuk didistribusikan ke ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam proses penyelenggaraan negara. Sehingga muncul sosok politisi negarawan maupun

negarawan yang politisi. Kaderisasi ini akan dilakukan secara berjenjang dalam wadah sekolah pemimpin perubahan dengan manajemen terpusat serta kurikulum yang jelas.

XIII. Dana Abadi Partai

- a. DANA ABADI KADERISASI merupakan anggaran untuk proses pendidikan kader yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Pendidikan kader menjadi elemen penting dalam membangun kedaulatan dan disiplin partai. Dengan pendidikan kader, muncul insan-insan partai yang memahami betul ideologi, norma, maupun tujuan partai sehingga melahirkan generasi kader yang militan, loyal, dan tahan banting.
- b. DANA ABADI SAKSI merupakan anggaran untuk memastikan kemenangan dalam kontestasi politik baik dalam Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, maupun Pemilu Kepala Daerah. Dengan kesiapan saksi yang kuat sejak jauh hari, maka probabilitas kemenangan kader yang mengikuti kontestasi politik akan jauh lebih besar.
- c. SUMBER DANA PARTAI berasal dari iuran anggota, iuran anggota pemegang amanah di bidang legislatif maupun eksekutif, amal usaha partai, dan sumbangan halal tidak mengikat.

XIV. Gerakan Layanan Sosial

- a. Gerakan layanan sosial merupakan gerakan untuk menjawab berbagai problem sosial kemasyarakatan yang dihadapi warga sehari-hari. Dengan gerakan layanan sosial ini, PKB benar-benar menjadi Solusi Bangsa yang selalu ada di tengah masyarakat. Gerakan layanan sosial ini terdiri dari (a) Lembaga Penyantun Faqir Miskin; (b) Lembaga Infaq Shodaqoh; (c) Lembaga Tanggap Bencana; (c) Lembaga Bantuan Hukum; dan (d) Lembaga Sertifikasi Profesi.
- b. Terkait mekanisme pembentukan, model lembaga, dan strategi gerakan akan diatur lebih rinci dalam peraturan partai.

XV. Memperkuat Basis Ekonomi

- a. Penguatan basis ekonomi merupakan upaya memfasilitasi peluang dan kerja sama usaha para kader baik antar sesama kader maupun kader dengan pihak-pihak lain. Penguatan basis ekonomi di kantong-kantong partai menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan ideologis, struktur, hingga kaderisasi dalam jangka panjang.
- b. Penguatan basis ekonomi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara di antaranya; (a) melakukan advokasi terhadap amal usaha para kader; (b) mendorong peningkatan akses modal usaha kader ke jasa layanan keuangan; dan (c) membuka peluang pasar bagi produk amal usaha kader.

XVI. Penguatan Manajemen Kinerja Fraksi

- a. Manajemen kinerja fraksi menjadi syarat utama efektivitas kontribusi partai dalam penyelenggaraan negara di bidang pengawasan, anggaran, maupun pembentukan norma perundangan. Manajemen fraksi juga dibutuhkan untuk memastikan proses penyerapan, penghimpunan, dan penyaluran aspirasi publik menjadi kebijakan negara bisa berjalan optimal.

- b. Penguatan manajemen kinerja fraksi bisa dilakukan dengan berbagai langkah seperti: (a) manajemen reses; (b) manajemen pembinaan konstituen; (c) kebijakan anggaran dan aspirasi; (d) manajemen humas fraksi; dan (d) peningkatan kapasitas legislator; dan
- c. Penguatan manajemen kinerja fraksi akan diatur lebih rinci dalam peraturan partai.

XVII. Pengembangan Lembaga Litbang Partai

- a. Pengembangan Lembaga Litbang Partai menjadi kebutuhan krusial seiring tuntutan besar terhadap penggunaan data sains dalam proses politik dewasa ini. Keberadaan Litbang Partai akan memastikan proses perumusan dan pengambilan kebijakan partai didasarkan pada pendekatan *scientific* yang objektif dan faktual. Dengan demikian keputusan dan kebijakan partai politik benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjamin realisasi target kemenangan dalam proses kontestasi politik.
- b. Pengembangan Litbang Partai ini terdiri dari: (a) pengembangan lembaga survei, (b) manajemen data, dan (c) pengembangan strategi partai.

XVIII. Pengembangan Media Komunikasi Publik

- a. Pengembangan media komunikasi publik menjadi syarat utama partai modern. Dengan sayap media komunikasi yang terstruktur, independen, dan berdaya maka berbagai aktivitas dan kinerja akan tersampaikan dengan baik ke publik. Penguatan media komunikasi ini juga untuk memastikan respons cepat terhadap berbagai fenomena terbaru yang menjadi diskursus publik.
- b. Pengembangan komunikasi media publik ini terdiri dari: (a) monitoring media; (b) strategi media *campaign*, (c) penetapan konten media, dan (d) distribusi konten media.